

KEHIDUPAN SUKU LAUT DI BATAM: SEBUAH FENOMENA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PULAU BERTAM KOTA BATAM

Atik Rahmawati, M.Kesos.¹

Suku Laut (*Sea Nomads*) merupakan salah komunitas pribumi (*indigenous people*) yang mendiami wilayah perairan Kepulauan Riau dengan jumlah terbanyak berdasarkan pendataan Departemen Sosial (Depsos) RI 1988, sekitar 11,23% terkonsentrasi berada di wilayah perairan Batam, berada di sekitar Selat Malaka, Selat Philip, dan Laut Cina Selatan. Disebut sebagai *Sea Nomads* karena keberadaannya yang hidup nomaden dengan melakukan seluruh aktifitas kegiatan hidup tinggal di sebuah perahu atau sampan yang beratapkan sebuah *Kajang*. Hidup nomaden di Laut tentu saja mempunyai resiko hidup yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa jika tiba-tiba cuaca buruk datang, disamping kurang keterjangkauan akan pelayanan sosial yang harusnya mereka dapatkan sebagai warga negara diantaranya pendidikan, kesehatan, perumahan. Hal ini juga mengingatkan bahwa sejak tahun 1973 Batam sebagai wilayah strategis daerah perbatasan negara tumbuh menjadi daerah Industri, perdagangan, galangan kapal, dan pariwisata yang mempunyai otoritas pengembangan wilayah. Pesatnya pembangunan di Batam tentu saja membawa pengaruh terhadap kehidupan Suku Laut, tak terkecuali dengan program pembangunan oleh Depsos RI terutama sejak tahun 1989 dengan penempatan mereka pada permukiman yang juga melibatkan unsur masyarakat setempat dalam hal ini Orsos Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam yang berada di pulau Bertam-Kota Batam. Tulisan ini berusaha menggambarkan kehidupan Suku Laut yang telah mengalami perubahan hidup menetap yang berada di pulau Bertam-Kota Batam dengan menyajikan *impact* yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Dampak Kebijakan, Komunitas Adat, Suku Laut.

¹ Penulis saat ini sebagai Staff Pengajar pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember. Kritik, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui rahmadilli@gmail.com. Tulisan ini merupakan hasil dan pengembangan dari tesis penulis di Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia dan telah disampaikan pada saat The 4th International Graduate Student Conference On Indonesia, October 30 – 31, 2012 dengan tema INDIGENOUS COMMUNITIES AND “THE PROJECTS OF MODERNITY” Graduate School Of Gadjah Mada University.

Pendahuluan

Program PKAT Suku Laut² di pulau Bertam merupakan program unggulan dari pemerintah dengan pelaksana program di bawah koordinasi Departemen Sosial dan merupakan proyek percontohan pembinaan Suku Laut melalui peran serta masyarakat, kerjasama Depsos RI dengan organisasi sosial yaitu Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Batam yang sebelumnya bernama Forum Komunikasi Dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit terjangkau³

Sebagai proyek percontohan, program ini melibatkan dukungan banyak pihak baik dari; pemerintah RI dalam hal ini Menteri Penerangan, Menkokesra, Mensos, Mendikbud, dan juga Menristek; non pemerintah diantaranya FKKS Batam dan juga yayasan NEBA (*Nedherland Batam*) sebagai penyedia dana dari luar negeri; disamping juga dari unsur akademisi yaitu Universitas Indonesia dan Institut Teknologi

Bandung.⁴ Program ini menjadikan pulau Bertam berubah menjadi pemukiman yang ramai dengan dibangunnya beberapa unit rumah tambahan dan fasilitas pendukung⁵. Mulai dari pembangunan rumah yang dilaksanakan dari tahun 1988 hingga tahun 1993, bangunan posyandu, gedung Sekolah Dasar, masjid, ruang serba guna, monumen tugu perahu, sumur, yetti (dermaga), jalan setapak di darat yang telah disemenisasi, jalan lingkaran didarat, sampai dengan listrik tenaga surya.

Rumusan Masalah

Dengan diadakannya pulau Bertam sebagai proyek percontohan tidak membuat pulau Bertam tumbuh menjadi permukiman yang berkembang baik dari penambahan jumlah sarana dan prasarana maupun dari jumlah warga suku laut yang menetap di pulau Bertam, seperti diungkap oleh Sekretaris RT 20 pulau Bertam sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

Dulu waktu pertamanya kali masuk pemukiman, banyak sekali bantuan yang datang, yang darinya pemerintah, K3S Batam (KKKS Batam), juga dari NEBA ada sembako, pembuatan rumah, termasuk jembatan yang sekarang sudah banyak lobang, juga dibuatnya tempat kesehatan juga dokter dan perawatnya, bangunan sekolah juga gurunya. Tapi sekarang jarang pemerintah datang, bantuan lebih banyak dari Bu Dar (yang dimaksud adalah Ibu Sudarsono, ketua KKKS Batam) tiap bulan ramadhan ada

² Suku Laut merupakan komunitas adat yang hidup mengembara di Laut, berdasarkan Literatur *The National Museum of Singapore* dalam Ringkasan Laporan pendataan Masyarakat Terasing di Daerah Perbatasan Riau oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing Depsos RI (1998) sebagian besar hidup di Kepulauan Riau.

³ (Direktorat PKAT, Depsos RI, hal.7).

⁴ Laporan Program FKKS Batam dan Pengarahan Menteri Sosial RI pada tanggal 21 Oktober 1998.

⁵ Arba dan Rahman. 2002. Menantang Gelombang Kehidupan Suku Laut di Pulau Bertam Perairan Batam.

sembako, buka puasa bersama, buat anak sekolah diberi seragam, sepatu. Bahkan sekarang banyak yang pergi ada yang kembali ke laut atau pindah ke belakang padang. Rumah tak ada sudah rubuh yang dipunya hanya sampan. Jadi sekarang tinggal 114 Jiwa. Kalau seperti ini terus bisa jadi Bertam makin sunyi (September, 2009).

Kehidupan yang harus dijalani komunitas Suku Laut terutama setelah penempatan mereka di Bertam mengalami berbagai persoalan baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Kehidupan nomaden komunitas Suku Laut dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 1: Suku Laut Sese kali Mendarat untuk Melakukan Barter, dan Suku Laut Hidup Mengembara secara berkelompok di Laut.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang “Bagaimana Kebijakan Pembangunan bagi Komunitas Suku Laut berdampak pada kehidupan Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam ?”.

Dari Kehidupan Nomaden di Laut menjadi Komunitas Yang Menetap di Pulau Bertam Kota Batam

Pulau Bertam merupakan salah satu gugusan pulau yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Desa Kasu Kecamatan Belakang Padang yang berjarak dari pulau Batam sekitar 7 mil dari pelabuhan Tanjung Ugang Batam atau 10 mil dari pelabuhan Sekupang Batam. Secara geografis wilayah Kota Batam sendiri mempunyai luas wilayah 1.570,35 km², yang terdiri dari 186 pulau besar dan kecil dengan pulau terbesar yaitu pulau Batam dengan luas 415 Km² atau yang disebut sebagai *Bonded area* sedangkan pulau-pulau kecil disekitarnya disebut sebagai daerah *Hinterland* termasuk pulau Bertam didalamnya.

Out put dari pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam salah satunya adalah bermukimnya secara permanen komunitas suku laut di pulau Bertam-Kota Batam. Hidup secara permanen menyebabkan adanya perubahan hidup yang harus dijalani yang tentu saja sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya sebagai pengembara diperairan sekitar wilayah Batam.

Berdasarkan hasil penelitian⁶ menunjukkan bahwa mereka cenderung untuk memilih hidup stabil secara permanen di permukiman dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya yang mereka jalani.

⁶ Rahmawati, Atik. 2011. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) studi pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam Kota Batam. Universitas Indonesia.

Kecenderungan pilihan hidup stabil di permukiman disebabkan diantaranya adalah terwujudnya keinginan warga untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus terutama melalui pendidikan formal, menjaga keselamatan jiwa keluarga karena bisa terhindar dari bahaya keganasan cuaca laut, serta kondisi tubuh yang mulai beradaptasi dengan lingkungan darat sehingga tubuh akan mulai merasa sakit jika dalam waktu yang lama berada di lautan.

Dengan demikian kehidupan stabil secara permanen yang dijalani akan berdampak pada ketenangan batin/ jiwa mereka sehingga dapat merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga khususnya bagi masa depan anak-anak melalui pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu sarana bagi peningkatan kualitas manusia, manusia yang berkualitas merupakan kekuatan sosial sebagai aset komunitas yang bermanfaat bagi perkembangan komunitas. Adi (2008) menyebutkan sebagai Modal manusia (*human capital*).

Suku Laut di Pulau Bertam Kota Batam sebagai Komunitas yang “Sudah Diberdayakan”

Landasan Hukum Program Pemberdayaan komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam dilatarbelakangi oleh disahkannya kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pola penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Departemen Sosial RI melalui program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terasing (PKSMT). Dalam tataran implementatif program ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur (tata nama) dari awal kali pertama disebut dengan istilah “Suku Terasing”, kemudian “Masyarakat Terasing” hingga kemudian pada tahun 1992 disebut sebagai “Komunitas Adat Terpencil” sesuai dengan Kepres. RI No. 111 tentang “Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT.

Perubahan ini dilakukan tidak secara serta merta, tetapi dengan melalui pengkajian dan evaluasi terhadap program sebelumnya. Yang berarti bahwa dalam pelaksanaan terdapat pembaharuan dan perbaikan metode dan penanganan. Demikian juga dengan perubahan nomenklatur “Masyarakat Terasing” menjadi “KAT”. Perbedaan dapat dilihat dari segi pelaksanaan, dimana program PKAT lebih mengedepankan konsep pemberdayaan (*bottom-up*) dengan mengutamakan aspirasi, inisiatif, dan partisipasi komunitas sasaran dalam setiap kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi, menumbuhkan sikap dan rasa percaya diri KAT untuk mengelola potensi yang ada pada dirinya guna melepaskan diri dari keterpencilan, hambatan geografis dan psikologis serta kemiskinan. Sedangkan dalam pelaksanaan PKSMT pemberdayaan dikemas dalam bentuk pembinaan dan cenderung bersifat *top down*.

Kedua pendekatan diatas merupakan pendekatan yang bertolak belakang karenanya kecenderungan penggunaan pendekatan *top down* atau *bottom-up* dalam pelaksanaan program akan menimbulkan

efek yang berbeda pada komunitas sasaran, Pressman dan Wilavsky dalam Parsons (2008: 468) mengungkapkan bahwa Model rasional *top down* berisi gagasan bahwa “implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem”. Begitu juga yang diungkapkan oleh Kusumanegara dan Nugroho (2010) yang melihat bahwa pendekatan *top down* hanya terfokus pada urusan birokrasi untuk melaksanakan keputusan politik semata dan mengesampingkan interaksi serta perasaan manusia. Lebih dalam Fermana (2009) dan Parsons (2008) menyatakan bahwa dalam relasi sosial yang koersif yang membahas tentang siapa objek keputusan, paradigam *top-down* gagal menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat karena keputusannya yang bersifat tirani dan elitis. Dengan penekanan terlalu banyak dikenakan pada definisi tujuan yang ditentukan dari atas, bukan pada peran pekerja di lapangan.

Hal ini tentu saja berbeda dengan penggunaan pendekatan *Bottom-Up*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Parsons (2008), Kusumanegara (2010), dan Nugroho (2010) bahwa pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang lebih *preskriptif* serta mengedepankan unsur desentralisasi dalam pelaksanaan program dan sudah menjadi keharusan suatu kebijakan publik yang menganut model demokrasi dirumuskan dari bawah (*bottom up*) sehingga pada nantinya lebih memungkinkan munculnya pemberdayaan

terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai target dari keputusan.

Implementasi kebijakan pada komunitas Suku Laut tercatat berdasarkan data Depsos RI tahun 2006 yang dimutakhirkan tahun 2008 menunjukkan bahwa suku laut yang merupakan Komunitas Adat terpencil (KAT) berada di pulau Bertam Desa Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam tercatat “sudah diberdayakan”, dengan pelaksanaan program dari awal tahun 1989/1990 sampai akhir tahun 1993/1994. Pemutakhiran menunjukkan bahwa program yang semula cenderung bersifat *top down* (PKSMT) serta merta dikategorikan sebagai program bersifat *bottom up* (PKAT).

Pudarnya Tradisi Budaya Kesenian “Silat Jung dan Joget”.

Suku laut merupakan bangsa yang maju (*Neolithicum*) bagian dari kelompok etnis (*indigenous People*) sebagai penduduk asli yang menempati wilayah perairan Batam mampu bertahan hidup selama berabad-abad lamanya dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan melekat pada kehidupan sehari-hari. Pelibatan tradisi budaya komunitas dapat memperkuat budaya pribumi/asli yang secara efektif membantu mereka untuk memiliki kendali nyata terhadap masyarakat mereka sendiri. Partisipasi budaya juga sebagai cara penting untuk membangun modal sosial, memperkuat masyarakat, dan menegaskan identitas, sebagaimana diungkapkan oleh Ife dan Tesoriero (2008). Demikian juga yang

diungkapkan Putnam dalam Suharto (2008: 98) bahwa “modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan”.

Yang terjadi pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam terkait aspek budaya saat ini adalah mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal ini kesenian diantaranya Silat, Jung, dan joget yang semula melembaga dalam kehidupan mereka sebagai media hiburan tempat warga melepas lelah setelah seharian berada di laut mencari tangkapan ikan. Salah satu tradisi yang masih ada pada saat ini adalah “Joget” namun demikian juga mengalami pergeseran dari tata cara dan peralatan yang digunakan. Jika sebelumnya Joget merupakan media hiburan gratis komunitas Suku Laut pada saat ini berubah menjadi media hiburan yang bisa mendorong warga untuk berperilaku hidup boros. Pertunjukkan “Joget” dilakukan oleh 10 penari yang kesemuanya masih dalam usia remaja dan berasal dari luar pulau Bertam dengan iringan musik modern yang menghentak dan tidak ada ketentuan serta aturan baku bagaimana penari harus menggerakkan badan. Kebiasaan ini dilakukan warga tiga bulan sekali sebagai hiburan melepas lelah setelah seharian mencari ikan. Karenanya biasanya dimulai dari jam 24.00 WIB setelah beberapa saat para warga pulang melaut dan berakhir pada jam 02.00 WIB atau kurang lebih 2 jam. Untuk sekali goyang warga harus mengeluarkan biaya Rp. 4.000,- dengan

durasi waktu kurang lebih 5 menit. Sehingga pengeluaran keseluruhan warga untuk sekali pertunjukan Joget adalah $\{(2 \times 60 \text{ menit}) / 5 \text{ menit}\} \times \text{Rp. } 4.000,- \times 10 \text{ penari}$, atau kurang lebih Rp. 960.000,- dan selama 1 tahun maka dapat terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 3.840.000,-. Ite dan tesoriero (2008) sendiri menyebutnya sebagai komodifikasi budaya.

Selain itu dampak langsung yang bersifat negatif yang dapat dilihat dari aspek budaya adalah munculnya sikap ketergantungan warga Bertam terhadap bantuan. Sifat ketergantungan muncul diakibatkan karena pandangan negatif pelaksana terhadap komunitas Suku Laut, akibatnya pelaksana program cenderung memanjakan warga dengan bantuan yang bersifat amal (*charity*). Program-program yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*) merupakan program yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang, sebagaimana yang diungkap oleh Adi (2008). Ketergantungan sendiri bukanlah merupakan tujuan dari sebuah kebijakan publik sebagaimana pendapat Nugroho (2006: 22) bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan”.

Sifat ketergantungan ini di sebabkan salah satunya karena pada saat proses pelaksanaan program warga terbiasa untuk menerima bantuan yang cenderung bersifat amal, akibatnya ketika terminasi

dilaksanakan yang menandakan bahwa program telah berakhir serta menandakan pula bahwa segala pembangunan sarana dan prasarana, bantuan yang diperoleh warga juga terhenti. Dengan selesainya program PKAT untuk komunitas Suku Laut di Bertam, maka FKKS Batam tidak lagi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan (*sustainable*) program tersebut. Untuk selanjutnya program pembangunan bagi warga Bertam akan disesuaikan dengan mekanisme penyaluran program pembangunan dari pemerintah atau melalui MUSRENBANG. Sedangkan mekanisme MUSRENBANG menghendaki adanya usulan akan prioritas kebutuhan warga yang berasal dari warga setempat dengan prasyarat adanya proposal analisis prioritas kebutuhan. Kondisi ini tentu saja mempersulit warga Bertam, hal ini disebabkan mayoritas warga khususnya orang tua tidak memiliki kemampuan membaca dan berhitung sehingga untuk memenuhi prasyarat tersebut adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan.

Keadaan tersebut terjadi salah satunya juga akibat *disfungsi* ketua RT yang disebabkan oleh kesehatan dan fisik pelaksana yang sudah tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Rukun Tetangga. Aparat pemerintah setempat yang kurang peduli dengan situasi dan kondisi warga di pulau Bertam menyebabkan permasalahan disfungsi ini menjadi berlarut-larut belum ada penyelesaian. Akibat lebih lanjut menunjukkan bahwa belum ada warga yang

menerima bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi produktif, sebagaimana diungkap oleh salah satu Informan yang merupakan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

Hal secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelum terminasi dilaksanakan, pelaksana belum mengikutsertakan warga dan kurang mempertimbangkan kualitas SDM dari komunitas sasaran. Adi (2008: 252) bahwa “Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih “mandiri” dengan memanfaatkan sumber daya yang ada”. Jika dalam pelaksanaan evaluasi tanpa melibatkan komunitas sasaran akibat selanjutnya dalam jangka panjang adalah belum dapat memunculkan kemandirian warga dan yang ada lebih cenderung pada ketergantungan.

Akibat lebih lanjut yaitu kurang menumbuhkan sikap kesadaran untuk menjaga dan memiliki sarana dan prasana yang diperoleh pada saat proses pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat

dari kurang terjaga dan terawatnya sarana dan prasarana hidup yang diperoleh warga Bertam diantaranya, kondisi rumah yang mulai banyak yang lapuk bahkan beberapa telah roboh, jembatan (pelantar) dan *yetti* (dermaga) yang sudah mulai lapuk dan berlubang, modem sebagai alat listrik tenaga surya yang mulai rusak dan tidak bisa digunakan, bangunan ruang serba guna yang sudah roboh, ruang kesehatan yang mulai rusak tidak lagi digunakan, monumen perahu yang sudah tidak lagi berada ditempatnya, dan juga rumah yang dibangun di darat yang semuanya roboh tinggal puing-puing.

Adanya sifat ketergantungan serta kualitas SDM yang rendah dan didorong oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap kebutuhan warga Bertam menyebabkan munculnya mobilitas warga Bertam yang dilakukan dengan pindah dari permukiman Bertam ke tempat yang lain, diantaranya ke pulau Lingga juga pulau Batam, atau juga kembali menjalani kehidupan sebagai Suku Laut yang nomaden di lautan

Kondisi ini secara tidak langsung menegaskan munculnya dampak negatif dari aspek budaya yang terjadi akibat dari pelaksanaan program PKAT khususnya bagi Komunitas Suku Laut yang ada di pulau Bertam-Kota Batam.

Lingkungan Yang Semakin Tercemar

Penggunaan model rumah semi permanen di darat dengan pancang-pancang kayu sebagai penyangga rumah serta model Mandi Cuci Kakus (MCK) yang langsung

terbuang di laut memicu adanya kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan ini menyebabkan lingkungan menjadi kotor, karena sampah yang dibuang tidak bisa terbawa arus laut sehingga pada saat air surut tiba, sampah masih tertinggal di kolong-kolong rumah tersangkut oleh pancang-pancang penyangga.

Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan pencemaran lingkungan. sedangkan lingkungan merupakan salah satu modal yang oleh Adi (2008) disebut *environmental capital* sebagai aset komunitas yang mendukung pengembangan masyarakat. Lingkungan yang tercemar berakibat buruk pada kondisi kesehatan warga, atau dapat dikatakan merupakan dampak negatif dari lingkungan.

Menurunnya Hasil Tangkapan Yang Berpengaruh Pada Pendapatan

Data hasil penelitian menunjukkan adanya polusi di perairan Batam yang diakibatkan oleh limbah dari industri perkapalan yang ada di sekitar pulau Batam. Jarak yang relatif dekat antara pulau Batam dan pulau Bertam menyebabkan polusi yang ada sampai pada perairan di pulau Bertam. Akibat lebih lanjut dari polusi ini adalah berkurangnya habitat ikan sehingga mempengaruhi hasil tangkapan warga Bertam, yang secara langsung berpengaruh pada pendapatan.

Mengingat pekerjaan utama mayoritas warga Bertam adalah nelayan sehingga pendapatan mereka sangat tergantung pada

hasil tangkapan ikan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dalam study kelayakan untuk menentukan lokasi permukiman yang dilaksanakan pada saat persiapan belum mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar pulau Bertam yang dapat berakibat terhadap kehidupan warga di masa yang datang. Dengan semakin sedikitnya tangkapan ikan di perairan Bertam dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bermukim di Bertam membuat sebagian besar warga melakukan kegiatan “Bertandang”.

Kegiatan bertandang dilakukan warga selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mencari ikan di sekitar perairan kepulauan Riau dengan membawa serta isteri juga anak mereka tak kecuali mereka yang masih dalam bangku sekolah. Akibat dari kegiatan ini lebih lanjut anak menjadi membolos sehingga berpengaruh pada proses belajar mengajar.

Kesadaran Hak Kepemilikan Tanah

Munculnya kesadaran warga Bertam atas kepemilikan tanah yang didorong oleh adanya kekhawatiran warga Bertam menyangkut legalitas secara hukum kepemilikan tanah sebagai akibat dari mayoritas warga yang belum memiliki Sertifikat Kepemilikan Tanah. Kepemilikan pulau Bertam secara umum terbagi atas dua warga yaitu bagian muka atau lokasi dimana permukiman berdiri yang merupakan milik sebagian warga Bertam dan hutan yang didalamnya terdapat perkebunan karet merupakan milik warga dari pulau Kasu

(pulau tetangga), dimana kepemilikan pertama atas tanah ada pada warga Kasu baru kemudian menyusul didirikan permukiman warga Bertam. Seperti yang diungkapkan oleh Ife dan tesoriero bahwa Isu yang sering muncul diseperti masyarakat adat adalah tanah dan spiritualitas (2008). Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelaksana kurang peka dengan isu-isu sentral seputar komunitas adat akibatnya pada saat program direncanakan dan diformulasikan, pelaksana program cenderung tidak mempertimbangkan aspek penilaian akan keberlanjutan kegiatan dari program yang dilaksanakan.

Munculnya Sikap Mengharap Akan Imbalan Tanpa Kerja Keras

Dampak tidak langsung dari program PKAT pada Komunitas Suku Laut yang ada di pulau Bertam adalah pemasukan sumber daya bagi Organisasi FKKS Batam serta perbaikan kualitas hidup dari petugas pendamping (*Community Worker*) pada saat pelaksanaan program berlangsung. Keberhasilan FKKS Batam menyelesaikan pelaksanaan program PKAT memberikan manfaat pada penambahan pemasukan sumber daya bagi operasionalisasi kegiatan, terutama berasal dari kepercayaan lembaga/ organisasi yang mempunyai tujuan yang sama sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan eksistensi organisasi.

Namun demikian bahwa kegiatan mempromosikan komunitas Suku Laut yang ada di Bertam oleh FKKS Batam juga memicu munculnya sikap mengharap akan

imbalan tanpa kerja keras, yang disebabkan oleh adanya kesadaran warga Bertam bahwa dirinya mempunyai nilai jual tinggi yang dapat menghasilkan uang, atau dapat dikatakan memicu munculnya dampak negatif aspek budaya.

Kesimpulan

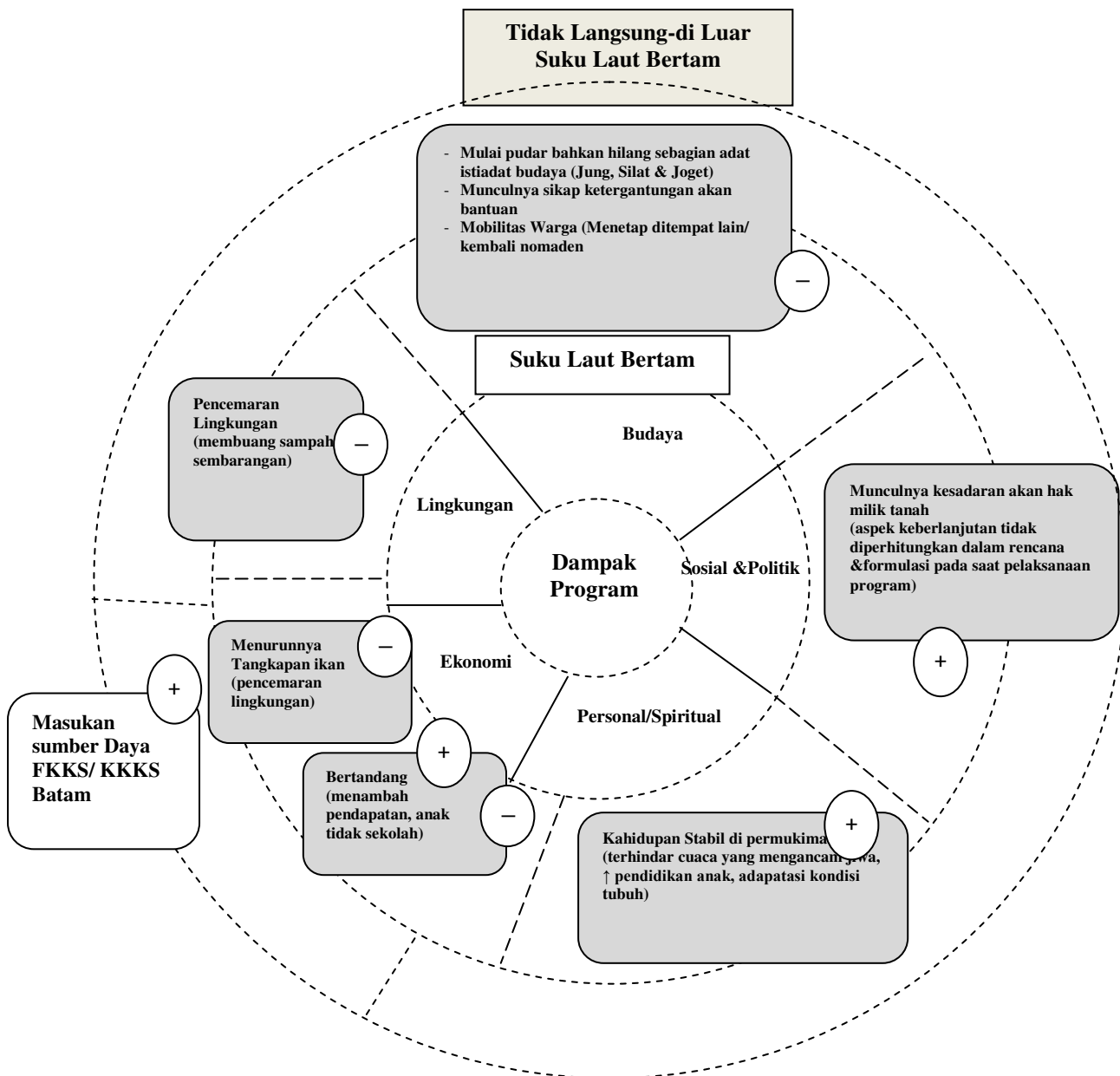
Sebagai sebuah model pengembangan masyarakat, pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam memiliki kelemahan mendasar yaitu pelaksanaan program tidak mempertimbangkan pada analisis kebutuhan (*need assessment*) komunitas sasaran, disamping juga mengesampingkan aspek budaya, adat dan istiadat komunitas sasaran serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah ditunjukkan dengan tingkat buta huruf yang tinggi menyebabkan Partisipasi komunitas sasaran masih terbatas pada Partisipasi Incentive (*Participation for Material Incentive*) pada level fase “menenangkan” atau masuk dalam kategori “tokenisme”⁷. Tokenisme dalam keadaan terburuk akan membuat orang-orang yang tak berdaya semakin tak berdaya dan terasing. Akibatnya saat ini komunitas suku laut yang ada di pulau Bertam menjadi kurang berkembang. Yang ditandai dengan adanya mobilitas warga baik pindah ke pulau

lain atau kembali menjalani kehidupan sebagai *sea nomads*.

Deskripsi singkat dampak pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:

⁷ Tokenisme dalam Ife dan Tesoriero (2008) merupakan praktek memberikan kebaikan-hati secara resmi kepada wakil kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat hanya untuk tujuan menghasilkan suatu penampilan yang jujur/adil.

**Gambar 2. Skema Dampak Program PKAT
pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-
Kota Batam**



Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arba, Syarofin dan Rahman, Abdul. (2002). *Menantang Gelombang Kehidupan Suku Laut Di Pulau Bertam Perairan Batam*. Batam: Pustaka Dinamika.
- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. (2005). *Pengembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*.

Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI.

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2004). *Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada 12 Provinsi*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial RI.

Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development* (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M.

- Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indihono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho D, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing. (1987). *Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing Ditjen BINKESOS-Departemen Sosial RI.
- Direktorat Bina Masyarakat Terasing. (1988). *Ringkasan Laporan Pendataan Masyarakat Terasing Di Daerah Perbatasan Riau*. Jakarta: Direktorat bina Masyarakat Terasing Ditjen BINKESOS- Departemen Sosial RI.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2002). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2009 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor: 06/PENGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial-Departemen Sosial RI.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2008). *Data Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2006 yang Dimutakhirkan Tahun 2008*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.